



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR MUFLICH JUNIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 187071

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	25.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.953.720
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	775.953.720
III. HUTANG	Rp.	473.340.322
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	302.613.398

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MA'IN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 250473

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 930.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI , Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 4.714 m2 di KAB / KOTA BREBES, Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 28 m2 di KAB / KOTA BREBES, Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 189.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO S SEPEDA MOTOR Tahun 2018, LAINNYA Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH SUV Tahun 2019, LAINNYA Rp. 160.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 S Tahun 2024, LAINNYA Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.400.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.082.474

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.126.482.474

III. HUTANG Rp. 657.818.213

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 468.664.261

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ILHAM MARADONA
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 494670

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	190.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, HONDA V1J02O32L1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	205.050.000
III. HUTANG	Rp.	21.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	183.450.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MIFTAHUL JANNAH**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **69251**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 777.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. Tanah Seluas 9.805 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 392.000.000
3. Tanah Seluas 649 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 46.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 58.282.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 25.794.766**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 907.076.766**

III. HUTANG **Rp. 972.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. -64.923.234**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REFNELLIS SYAM
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 998011

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/126 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 23.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.466.121

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 382.466.121

III. HUTANG Rp. 559.318.753

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -176.852.632

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Yth. Sdr **SYU'IB**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: SYU'IB
Jabatan	: PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA - BALAI PERIKANAN : BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM, JAMBI - DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 31 Desember 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**



IKHTISAR LHKPN a.n SYU'IB
(Jenis Laporan - Tahun: Khusus (Awal Menjabat) – 2025)
NIK 1507081510860002

1. DATA PRIBADI

Nama	: SYU'IB
NIK	: 1507081510860002
No KK	: 1571081306140003
NPWP	: 1507081510860002
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: JAMBI/30 Januari 1986
Status Nikah	: Menikah
Agama	: ISLAM
Alamat	: Jalan Kebun Daging RT.33, ALAM BARAJO, KOTA JAMBI, JAMBI
Nomor Handphone	: 085378999411
Email	: syuib.alidrus@gmail.com
NHK	: -
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jabatan	: PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA - BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM, JAMBI - DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
Tanggal Lapor	: 31 Desember 2025
Tanggal Kirim	: -
Status	: Draft



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	KHAIRUNISSA	ISTRI	JAMBI , 31 Juli 1990 / PEREMPUAN	IBU RUMAH TANGGA	Jalan Kebun Daging RT.33, Kelurahan MAYANG MANGURAI, Kecamatan ALAM BARAJO, KOTA JAMBI , Provinsi JAMBI
2	HAFSHAH	ANAK TANGGUNGAN	JAMBI , 14 Agustus 2014 / PEREMPUAN	PELAJAR	Jalan Kebun Daging RT.33, Kelurahan MAYANG MANGURAI, Kecamatan ALAM BARAJO, KOTA JAMBI , Provinsi JAMBI
3	SA'AD	ANAK TANGGUNGAN	JAMBI , 18 April 2020 / LAKI-LAKI	PELAJAR	Jalan Kebun Daging RT.33, Kelurahan MAYANG MANGURAI, Kecamatan ALAM BARAJO, KOTA JAMBI , Provinsi JAMBI
4	KHALID IBNU SYU'AIB	ANAK TANGGUNGAN	JAMBI , 21 Mei 2024 / LAKI-LAKI	-	Jalan Kebun Daging RT.33, Kelurahan MAYANG MANGURAI, Kecamatan ALAM BARAJO, KOTA JAMBI , Provinsi JAMBI

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM, JAMBI

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : JL. JAMBI PALEMBANG	Tanah: 419 m ² Bangunan: - m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 02351	Rp. 0	Rp. 80.000.000	-



NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
	Kel. / Desa : SEBAPO Kecamatan : MESTONG Kab. / Kota : KOTA JAMBI Prov. / Negara : JAMBI / INDONESIA		Atas Nama: LAINNYA (HERMANSYAH) Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: LAINNYA Tahun Perolehan: 2022			
2	Jalan / No : KEBUN DAGING Kel. / Desa : MAYANG MANGURAI Kecamatan : ALAM BARAJO Kab. / Kota : KOTA JAMBI Prov. / Negara : JAMBI / INDONESIA	Tanah: 162 m ² Bangunan: 90 m ²	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 14873 Atas Nama: LAINNYA (SUWARNO) Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: TEMPAT TINGGAL Tahun Perolehan: 2014	Rp. 0	Rp. 110.000.000	-
Sub Total					Rp. 190.000.000	

4.2.ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOBIL Merk : TOYOTA Model : AVANZA Tahun Pembuatan : 2009 No. Pol. / Registrasi : BH1855LV	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: LAINNYA (MUHAMMAD SAHRIL) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: MUHAMMAD SAHRIL Tahun Perolehan: 2023	Rp. 0	Rp. 110.000.000	-
2	Jenis : MOTOR Merk : YAMAHA Model : MIOJ Tahun Pembuatan : 2014	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: LAINNYA (SUSI DWI HANDAYATI)	Rp. 0	Rp. 7.000.000	-



NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
	No. Pol. / Registrasi : BH6266PT	Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: SUSI DWI HANDAYATI Tahun Perolehan: 2020			
3	Jenis : MOTOR Merk : HONDA Model : CB150R Tahun Pembuatan : 2014 No. Pol. / Registrasi : BH5271ID	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: LAINNYA (ALPIAN) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: ALPIAN Tahun Perolehan: 2019	Rp. 0	Rp. 12.000.000	-
Sub Total				Rp. 129.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.4. SURAT BERTAGIH

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
----	--------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------



NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
Sub Total				Rp. 0	Rp. 0

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 128.526.819	Rp. 0
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 0	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 203.214	Rp. 0
Sub Total		Rp. 128.730.033	Rp. 0

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
Sub Total		Rp. 0

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
Sub Total		Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
Sub Total		Rp. 0



7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 319.000.000	Rp. 0	Rp. 319.000.000

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.